

Hindari Polemik, Harus Harmonis

Eksekutif dan Legislatif

MEMPAWAH-Tokoh masyarakat Mempawah Drs H Daeng Syarifudin mengajak semua pihak untuk melihat setiap persoalan dengan kepala dingin. Jangan jadikan media sebagai ajang untuk berpolemik.

Mantan Plh Setda itu melihat kisruh yang mencuat belakangan ini, seputar adanya upaya hukum yang dilakukan Sabli Awaludin, Wakil Ketua DPRD yang memolisikan Bupati Mempawah, lantaran namanya tidak masuk dalam RHP draf laporan oleh BPK RI APBD TA 2009 dan APBD TA 2010.

"Kita tidak menyalahkan upaya hukum yang ditempuh, jika Sabli Awaludin mengindikasikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan atau pencemaran nama baiknya," nilai mantan asisten Tata Praja Setda.

Halnya dengan upaya mengklarifikasi yang disampaikan bagian Hukum Setda yang menjelaskan, kalau perbuatan itu bukan ada unsur kesengajaan, dan bukan dilakukan oleh Pemkab Mempawah, melainkan kekeliruan itu oleh BPK RI yang juga sudah membuat klarifikasi.

"Kesalahan itu ranahnya bukan harus ditempuh melalui jalur hukum, karena hanya sebatas kesalahan administrasi saja," paparnya.

Justru mantan birokrasi itu minta Sabli Awaludin untuk melakukan koordinasi sebelum menempuh upaya hukum dengan mempolisikan pejabat negara. Eksekutif dan legislatif itu ibarat dua sisi mata uang. Satu dan lainnya saling keterkaitan yang didasarkan pada kedekatan emosional.

"Jika ada hal-hal yang seperti itu, pastinya ditanyakan. baru mengambil sikap melalui jalur hukum jika tidak ada respon. Toh, klarifikasi sudah disampaikan Pemda kepada penasehat hukum Sabli Awaludin," paparnya.

Dia menilai, polemik kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaludin menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Tokoh Masyarakat (Tomas) Kota Mempawah. Diapun sebagai salah satu tokoh masyarakat mengajak semua pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin.

Munculnya kasus dugaan penyemaran nama baik itu jangan dikolerasikan secara pribadi. Sebab permasalahan yang muncul cenderung pada institusi.

"Akan lebih arif dan bijaksana jika diselesaikan secara kelembagaan antara DPRD dan Pemkab Pontianak. Bukannya sengaja dijadikan konsumsi publik," saran dia.

Justru munculnya polemik itu di publik hanya perkeruh suasana. Bahkan ada yang sengaja dipolitisasi, sehingga tidak dapat diselesaikan secara teknis fungsional dan normatif.

Dia mengajak semua untuk melihat persoalan itu secara profesional dan dewasa. Jangan dijadikan perdebatan dan pertentangan bagi yang berpolemik.

Disarankan, eksekutif dan legislatif dapat harmonis dan bersama-sama bekerja keras tanpa pamrih untuk memajukan daerah dan masyarakat. Masih banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan pasca pemekaran daerah.

"Pikirkan cara meningkatkan PAD, dapatkan anggaran dari pusat hingga menambah APBD dan mensejahterakan rakyat. Tunjukkan prestasi dan kualitas, pejabat di daerah ini mampu mengemban amanah rakyat," kiaskan Daeng. (*ham*)